



JPI

**JURNAL
PENGABDIAN
DAN INOVASI**

JPI Papsel Jurnal Pengabdian dan Inovasi

Vol. 3 No. 01 (2026) : 1-5

Journal homepage <https://journal.papsel.org/index.php/JPI/index>

Integrasi Data lapangan pada Penagihan Pajak Reklame di Kota Surabaya

Hilya Ainus Shofa¹

¹Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

E-mail: shofahilya@gmail.com

Received: 17-04-2026

Accepted: 04-06-2026

Published: 15-06-2026

Abstract

The Surabaya City Regional Revenue Agency (Bapenda) is facing a problem with the discrepancy between advertising object data in the Regional Tax Monitoring System (MONPD) and actual conditions in the field. This data discrepancy has an impact on the suboptimal advertising tax collection process and has the potential to cause leakage of Regional Original Revenue (PAD). This community service activity aims to improve data accuracy and the effectiveness of advertising tax collection through the integration of digital data in MONPD with field verification results. The implementation method includes field observation, re-registration of advertising objects, physical measurement of media, recording coordinate points using GPS, visual documentation, and updating data into the MONPD system. The results of the activity showed the discovery of various data discrepancies, such as advertisements with expired permits that are still installed, unlicensed advertisements and incorrect coordinate points. The data integration carried out has an impact on increasing database accuracy, the accuracy of issuing warning letters, and mapping tax objects that are more targeted. This activity contributes significantly to strengthening the advertising tax collection system and supporting the optimization of Surabaya City's PAD

Keywords: data integration; billboard tax; MONPD; tax collection; regional revenue agency

Abstrak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya sedang menghadapi permasalahan dengan ketidaksesuaian data objek reklame dengan sistem Monitoring Pajak Daerah (MONPD) dengan kondisi aktual di lapangan. Ketidaksamaan data ini berdampak pada tidak optimalnya proses penagihan pajak reklame serta berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas penagihan pajak reklame melalui integrasi data digital pada MONPD dengan hasil verifikasi lapangan. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, pendataan ulang objek reklame, pengukuran fisik media, pencatatan titik koordinat menggunakan GPS, dokumentasi visual, serta pembaruan data ke dalam sistem MONPD. Hasil kegiatan menunjukkan ditemukannya berbagai ketidaksesuaian data, seperti reklame masa izin berakhir tetapi masih terpasang, reklame tidak berizin serta kesalahan titik koordinat. Integrasi data yang dilakukan berdampak pada peningkatan akurasi database, ketepatan penerbitan surat teguran, serta pemetaan objek pajak yang lebih tepat sasaran. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat sistem penagihan pajak reklame dan mendukung optimalisasi PAD kota Surabaya.

Kata Kunci: *integrasi data; pajak reklame; MONPD; penagihan pajak; Bapenda Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi signifikan di wilayah perkotaan adalah pajak reklame, mengingat tingginya aktivitas promosi dan penggunaan ruang publik oleh pelaku usaha (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan pajak reklame menuntut sistem administrasi yang tertata, akurat, dan mampu mencerminkan kondisi aktual objek pajak.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah mulai memanfaatkan sistem informasi sebagai alat pendukung

pengelolaan pajak daerah. Pemanfaatan sistem informasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta ketepatan pengambilan keputusan dalam proses penagihan pajak (Sutabri, 2012; Yusuf, 2021). Bapenda Kota Surabaya mengimplementasikan Sistem Monitoring Pajak Daerah (MONPD) sebagai platform pengelolaan data pajak reklame, mulai dari pendataan hingga penagihan.

Meskipun sistem MONPD telah membantu proses administrasi, permasalahan masih ditemukan dalam bentuk ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan. Beberapa objek reklame tercatat aktif dalam sistem meskipun telah dibongkar, sementara reklame yang masih terpasang tidak seluruhnya terdata

atau memiliki izin yang masih berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas penagihan serta membuka peluang terjadinya kebocoran PAD. Oleh karena itu, diperlukan integrasi data lapangan secara langsung ke dalam sistem MONPD agar informasi yang digunakan sebagai dasar penagihan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya dengan melibatkan petugas pengelola dan penagih pajak reklame sebagai mitra kegiatan. Fokus pengabdian diarahkan pada integrasi data kondisi lapangan ke dalam Sistem Monitoring Pajak Daerah (MONPD) yang digunakan sebagai basis pengelolaan dan penagihan pajak reklame (Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2024).

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan pendampingan dan verifikasi lapangan. Tahap awal dimulai dengan koordinasi bersama mitra untuk mengidentifikasi objek reklame yang memerlukan pengecekan langsung berdasarkan data yang tercatat dalam sistem MONPD. Data awal tersebut digunakan sebagai dasar penentuan lokasi dan objek reklame yang akan diverifikasi di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah observasi dan verifikasi lapangan yang meliputi pengecekan keberadaan fisik reklame, kesesuaian ukuran media, lokasi

pemasangan, serta masa berlaku izin reklame. Selain itu, dilakukan pengambilan dokumentasi visual sebagai bukti kondisi aktual objek reklame. Kegiatan verifikasi lapangan dilaksanakan secara langsung bersama petugas mitra guna memastikan kesesuaian temuan dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya akurasi data.

Hasil verifikasi lapangan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem MONPD melalui pembaruan data objek reklame. Pembaruan meliputi penyesuaian status objek, perbaikan data ukuran dan lokasi, serta pengelompokan objek berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi bersama mitra untuk menilai dampak integrasi data terhadap efektivitas penagihan dan pengawasan pajak reklame.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan integrasi data lapangan ke dalam Sistem Monitoring Pajak Daerah (MONPD) menghasilkan temuan yang menunjukkan adanya perbedaan antara data administratif yang tercatat dalam sistem dengan kondisi aktual objek reklame di lapangan. Sebelum integrasi dilakukan, sistem MONPD masih memuat data reklame yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan riil, seperti objek reklame yang telah dibongkar namun masih tercatat aktif, reklame dengan izin kedaluwarsa yang masih terpasang, serta perbedaan ukuran fisik media reklame yang berdampak pada

perhitungan pajak reklame. Selain itu, ketidaktepatan titik koordinat lokasi objek juga menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan dan penagihan di lapangan.

Melalui kegiatan observasi dan verifikasi lapangan, kondisi aktual objek reklame dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Verifikasi dilakukan dengan mengecek keberadaan fisik reklame, kesesuaian ukuran media, lokasi pemasangan, serta masa berlaku izin reklame. Dokumentasi visual turut dikumpulkan sebagai bukti pendukung hasil observasi lapangan. Proses ini menunjukkan bahwa sebagian objek reklame yang belum tercatat dalam sistem MONPD berasal dari reklame tanpa izin atau reklame yang tidak melakukan pembaruan data secara berkala. Temuan tersebut menegaskan bahwa pembaruan data berbasis lapangan memiliki peran penting dalam menjaga validitas sistem informasi pajak daerah.

Hasil verifikasi lapangan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem MONPD melalui pembaruan data objek reklame. Pembaruan dilakukan dengan menyesuaikan status objek, memperbaiki data ukuran dan lokasi, serta memperbarui dokumentasi visual sesuai dengan kondisi aktual. Integrasi data ini menjadikan database MONPD lebih mutakhir dan representatif, sehingga memudahkan petugas dalam mengidentifikasi objek pajak yang memerlukan tindak lanjut administratif. Sistem MONPD tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat

pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan dalam proses pengawasan dan penagihan pajak reklame.

Dampak integrasi data lapangan terlihat pada meningkatnya ketepatan penagihan pajak reklame. Informasi yang tersaji dalam sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga penerbitan surat teguran dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Peningkatan jumlah objek reklame yang teridentifikasi sebagai belum memenuhi kewajiban pajak tidak mencerminkan penurunan tingkat kepatuhan, melainkan menunjukkan bahwa objek yang sebelumnya tidak tercatat kini telah masuk dalam pengawasan sistem. Kondisi ini membuka peluang optimalisasi penerimaan pajak reklame secara lebih menyeluruh.

Temuan kegiatan pengabdian ini sejalan dengan pandangan bahwa akurasi data dan pengawasan lapangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak daerah (Widodo & Kurniawan, 2020). Sistem informasi yang tidak didukung oleh data lapangan yang valid berisiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Oleh karena itu, integrasi antara sistem digital dan verifikasi lapangan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan pajak reklame di wilayah perkotaan. Melalui kegiatan ini, integrasi data lapangan terbukti mampu memperkuat fungsi sistem MONPD sebagai alat pengelolaan pajak reklame yang akurat, efektif, dan berkelanjutan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa integrasi data lapangan ke dalam sistem MONPD memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan dan penagihan pajak reklame di Kota Surabaya. Verifikasi lapangan mampu mengungkap ketidaksesuaian data yang sebelumnya tercatat dalam sistem, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara lebih akurat. Integrasi ini meningkatkan ketepatan identifikasi objek pajak, mendukung efektivitas penagihan, serta memperkuat fungsi sistem MONPD sebagai alat pendukung pengambilan keputusan.

Saran

Disarankan agar Bapenda Kota Surabaya melakukan verifikasi lapangan secara berkala untuk menjaga akurasi data pajak reklame dalam sistem MONPD. Selain itu, penguatan koordinasi antara petugas lapangan dan pengelola sistem perlu terus ditingkatkan agar setiap perubahan kondisi objek reklame dapat segera diperbarui. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak reklame dan peningkatan PAD secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. (2024). *Sistem Monitoring Pajak Daerah (MONPD)*. Surabaya: Bapenda Kota Surabaya.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Optimalisasi penerimaan pajak daerah*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2010). *Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pajak Daerah*.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, T., & Kurniawan, D. (2020). Analisis efektivitas penagihan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 45–56.
- Yusuf, M. (2021). Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 22–30.